



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara pada umumnya serta Kota Administratif Ternate pada umumnya serta Kota Administratif Ternate pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dimaksud pada masa mendatang;
  - b. bahwa Kota Administratif Ternate dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diakui dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
  - c. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
  - d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Ternate dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - e. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate harus ditetapkan dengan Undang-undang.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. **Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958** tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
4. **Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958** tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
5. **Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999** tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Kota Administratif Ternate adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate.

4. Kabupaten ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 60) sebagai Undang-undang.
5. Propinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

#### Pasal 3

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate meliputi wilayah:
  - a. Kota Administratif Ternate, yang terdiri dari:
    - 1) Kecamatan Kota Ternate Utara;
    - 2) Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  - b. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang terdiri dari:
    - 1) Kecamatan Pulau Ternate;
    - 2) Sebagian Kecamatan Makian yang dimasukkan ke dalam Kecamatan Pulau Ternate yang terdiri dari Desa Kota Moti, Desa Tafamutu, Desa Takofi, dan Desa Tafaga.
- (2) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut:
  - 1) Kecamatan Kota Ternate Utara;
  - 2) Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  - 3) Kecamatan Pulau Ternate;

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara II Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 5

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Kota Administratif Ternate dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dihapus.

#### Pasal 6

- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Maluku;
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Halmahera;
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku;
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

### BAB III PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

#### Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dipilihnya dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

#### Pasal 11

(1) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bi bidang:

a. Pemerintahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. Pemerintahan Umum;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
  - f. Sosial;
  - g. Keuangan Daerah;
  - h. Lingkungan Hidup;
  - i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - j. Pertanian Tanaman Pangan;
  - k. Perkebunan;
  - l. Kehutanan;
  - m. Perikanan;
  - n. Peternakan;
  - o. Perindustrian dan Perdagangan;
  - p. Pertambangan;
  - q. Pariwisata;
  - r. Tenaga Kerja.
- (2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ternate untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

#### Pasal 13

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate terdiri dari:
- a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di daerah tersebut;
  - b. Anggota ABRI yang diangkat.

(2) Tata ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Tata cara pengangkatan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate:
- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;
  - b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
  - d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;
  - e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

Pasal 15 ...

Pasal 15



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
- (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal diresmikannya.

#### Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

#### Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 45



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE

I. UMUM

Kota Ternate adalah merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Propinsi Daerah Tingkat I Maluku. Mengingat perkembangan Kota Ternate yang cukup pesat, maka Kota Ternate dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 ditetapkan menjadi Kota Administratif yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu, Kecamatan Kota Ternate Utara dan Kecamatan Ternate Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Administratif Ternate saat ini tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri serta menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu Kota Administratif Ternate secara geografis mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta merupakan suatu pulau besar, dan beberapa pulau kecil.

Perkembangan Kota Ternate tersebut di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata 2.16% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan, serta pelayanan masyarakat di Kota Administratif Ternate.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat dan sesuai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara tanggal 19 Maret 1997 Nomor 188.4/06/DPRD/MU/1997 tentang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Atas Usul Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II dan Satu Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku tanggal 12 Maret 1997 Nomor 01 Tahun 1997 tentang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Terhadap Pemekaran Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II yang baru, sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Dalam rangka pengembangan fungsi kotanya sesuai dengan potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang terutama untuk sarana dan prasarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate tidak hanya terdiri dari wilayah Kota Administratif Ternate, tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara lainnya, yaitu Kecamatan Pulau Ternate dan sebagian wilayah Kecamatan Makian yang meliputi Desa Kota Moti, Desa Tafamutu, Desa Takofi dan Desa Tafaga. Keempat desa tersebut berada di Pulau Moti.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Kota Administratif Ternate yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 dihapus. Dengan demikian Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara berkurang seluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate berasal dari Wilayah Kota Administratif Ternate yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara lainnya, yaitu Kecamatan Pulau Ternate dan sebagian wilayah Kecamatan Makian yang meliputi Desa Kota Moti, Desa Tafamutu, Desa Takofi, dan Desa Tafaga.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.

#### Ayat (3)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Penentuan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang khususnya untuk mengembangkan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan.

Untuk itu penataan ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dan Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Otonomi, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.

Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ternate diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku sampai dengan dilantiknya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir ialah pada prinsipnya penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada pertimbangan suara hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung, perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas oleh Kota Administratif Ternate.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, diserahkan pula kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

Berkenaan Dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate adalah dihitung sejak dilantiknya Penjabat Walikota Kepada Daerah Tingkat II Ternate.

Pelantikan Penjabat Walikota Daerah Tingkat II Ternate didahului peresmian pembentkan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Setelah satu tahun peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri, untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3824